

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang terus berkembang sudah semestinya berupaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian bangsa agar tidak semakin tertinggal oleh negara lain. Pemerintah melakukan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang perekonomian yang pelaksanaan kegiatannya salah satunya dikembangkan melalui koperasi. Koperasi dapat menunjang perekonomian masyarakat apabila dijalankan dengan sesuai tujuannya.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, badan usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Membangun dan mengembangkan potensi dalam kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya merupakan salah satu peranan dan fungsi koperasi. Selain itu, fungsi dan peranan koperasi yang lain yaitu berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru; serta berusaha untuk mewujudkan

dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun definisi koperasi berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 bahwa:

“ koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Tamba (2004) menyatakan berdasarkan jenis usahanya koperasi dibedakan menjadi empat yaitu: koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha koperasi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat umumnya serta meningkatkan sisa hasil usaha koperasi. Diantara banyaknya jenis koperasi, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang sangat berkembang pada saat ini, banyak koperasi simpan pinjam yang bermunculan hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 15/per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam meliputi:

1. Menghimpun simpanan dari anggota
2. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya
3. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

Dilihat dari tingkat dan luas daerah kerjanya Koperasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang memiliki anggota minimal sebanyak 20 orang. Wilayah koperasi primer meliputi satu lingkungan kerja, kelurahan atau desa. Sedangkan koperasi sekunder merupakan koperasi yang dibentuk koperasi-koperasi dan memiliki cakupan kerja yang luas. Koperasi sekunder biasanya dibuat untuk efisiensi dan pemusatan maka dari itu cakupan wilayahnya dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Koperasi juga terbagi menjadi dua yaitu koperasi single purpose dan multi purpose. Single purpose yaitu koperasi yang kegiatannya hanya ada satu bidang usaha saja sedangkan multi purpose yaitu koperasi yang kegiatannya banyak berbagai jenis usaha.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius (KPRI SADAR). koperasi termasuk kedalam koperasi primer dan termasuk kedalam jenis koperasi single purpose atau dengan kata lain koperasi ini hanya memiliki satu bidang usaha yaitu simpan pinjam. KPRI SADAR terletak di Pangalengan Jawa Barat yang anggotanya berprofesi sebagai pegawai negeri (guru). Tujuan koperasi ini yaitu memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup dan pendapatan bagi anggotanya. Koperasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota terutama bagi anggota yang membutuhkan pinjaman dengan melihat peluang tersebut koperasi diharapkan dapat memajukan mengenai perannya dalam menunjang perekonomian anggotanya.

Seperti pada Koperasi KPRI SADAR salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Bandung yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, yang

sebagian penjualannya dilakukan secara kredit berarti perusahaan mengadakan piutang. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan sistem akuntansi piutang yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya pada saat rapat anggota. Mengingat piutang merupakan modal kerja yang diharapkan dapat memperoleh tambahan penghasilan dan laba, maka kehadiran piutang memerlukan analisis yang cukup mendalam karena dimungkinkan perkiraan piutang membutuhkan investasi yang cukup besar dan mengandung resiko yang cukup besar dan dapat merugikan perusahaan.

Oleh karena itu, manajemen piutang memiliki peranan yang sangat penting di dalam koperasi dalam kaitannya terhadap penilaian piutang, pencatatan piutang dan prosedur piutang sehingga dapat memberikan gambaran tentang untung ruginya dilaksanakan penjualan usaha secara piutang. Efektivitas pengelolaan piutang diperlukan pada perusahaan yang tercermin dari jumlah piutang dan tingkat perputaran piutang yang dapat mengantisipasi, memperkecil bahkan menghilangkan resiko yang mungkin akan terjadi dari piutang.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) memiliki anggota sebanyak 237. Dengan jumlah anggota koperasi yang cukup banyak maka KPRI SADAR memerlukan sistem akuntansi piutang untuk mengetahui jumlah piutang dan pengelolaan piutang yang baik, terutama pada salah satu bidang usaha yang bergerak dalam simpan pinjam anggota. Dalam hal ini sistem akuntansi piutang perlu diteliti untuk mengetahui apakah prosedur sudah sesuai dengan ketentuan, apakah dokumen, fungsi dan catatan akuntansi yang diinginkan sebagai alat pengawasan oleh manajemen sudah efektif dalam

pengendalian terhadap piutang. Apakah fungsi yang terkait diantara fungsi kas terpisah dari fungsi akuntansi sehingga fungsi yang terpisah dapat saling mengoreksi dan dapat berperan sesuai dengan tugas masing-masing sehingga tidak ada kesalahan dalam mengelola piutang yang timbul di koperasi.

Namun pada kenyataannya KPRI SADAR Pangalengan belum sepenuhnya melakukan pemisahan fungsi, yaitu fungsi kas dan fungsi akuntansi dilakukan oleh satu orang, sehingga keadaan ini kurang baik adanya karena belum sesuai dengan teori akuntansi atau dasar-dasar akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang memanglah sangat penting bagi instansi/perusahaan, terlebih lagi bagi koperasi. KPRI SADAR Pangalengan memiliki sistem akuntansi piutang yang cukup baik, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang ini sebenarnya adalah merupakan hal yang membahas atau mengenai fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan, unsur pengendalian intern, dan prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang pada perusahaan/instansi tersebut.

Berdasarkan beberapa unsur tersebut dapat ketentuan yang harus diterapkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan tersebut. KPRI SADAR Pangalengan terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Kesalahan tersebut terletak pada perangkapan fungsi yang terkait merupakan bagian dalam organisasi unsur pengendalian intern. Ketentuan pada organisasi unsur pengendalian intern tersebut adalah fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas.

Pada KPRI SADAR Pangalengan ini tidak melakukan dan melaksanakan

ketentuan-ketentuan tersebut. Kesalahan tersebut adalah dilaksanakannya fungsi akuntansi dan fungsi kas oleh 1 orang yang sama. Kesalahan ini menjadi fatal adanya, karena dapat menimbulkan kecurigaan akan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindakan korupsi, kesengajaan dalam pencatatan jumlah nominal piutang dimana tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh anggota. Hal ini kemungkinan sudah berlangsung secara turun menurun dan membudayakan pada KPRI SADAR Pangalengan seharusnya disikapi dengan adanya petugas atau karyawan yang cakap dalam akuntansi dan paham ketentuan-ketentuan sehingga dapat membantu serta memperbaiki sistem akuntansi piutang pada KPRI SADAR Pangalengan tersebut.

Tabel 1. 1 Perkembangan piutang yang disalurkan dengan jumlah piutang yang bermasalah di KPRI SADAR Pangalengan

| Tahun | Anggota peminjam (orang) | Piutang pinjaman yang disalurkan (Rp) | Pinjaman bermasalah (Rp) | Presentase (%) |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 2016 | 283 | 6.584.114.469 | 744.008.324 | 11,3 |
| 2017 | 268 | 7.031.432.573 | 1.560.274.887 | 22,19 |
| 2018 | 256 | 7.247.909.868 | 2.239.604.148 | 30,9 |
| 2019 | 210 | 7.325.638.803 | 1.155.619.521 | 15,77 |
| 2020 | 237 | 7.487.056.106 | 1.669.613.510 | 22,3 |

Sumber: RAT 2016-2020

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa piutang bermasalah setiap tahunnya meningkat maka dari itu pengendalian internal yang bermasalah menyebabkan sistem akuntansi yang tidak baik oleh karena itu bisa dilakukan analisis oleh sistem pengendalian innal menurut The Commite Of Sponsoring Organization COSO menurut bambang Hartadi tahun 2010 yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan

pemantauan. Maka berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis memfokuskan penulisan Skripsi ini dengan Judul " **ANALISIS IMPLEMENTASI INTERNAL CONTROL DALAM SISTEM AKUNTANSI PIUTANG**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Fungsi apa saja yang terkait dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI SADAR Pangalengan?
2. Catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI SADAR Pangalengan?
3. Sejauhmana pengendalian internal piutang pada KPRI SADAR Pangalengan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi dalam identifikasi masalah penelitian

1.3.2 Tujuan Penelitian

adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi apa saja yang terkait dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI SADAR Pangalengan

2. Untuk mengetahui catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI SADAR Pangalengan
3. Untuk mengetahui sejauhmana pengendalian internal pada KPRI SADAR Pangalengan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, baik dari aspek teoritis(keilmuan) maupun aspek praktis(guna laksana):

1.4.1 Aspek Teoritis

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini akan meningkatkan wawasan dan pengalaman baik dari pengetahuan teoritis maupun praktis
- b. Bagi peneliti lain, dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya

1.4.2 Aspek praktis

Yaitu bagi KPRI SADAR, dari hasil penelitian ini semoga memberikan manfaat dan memberikan masukan bagi koperasi terkait dengan pentingnya sistem akuntansi piutang.